# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Manusia selalu dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan sehari-hari yang kadang hanya sekedar untuk mempertahankan status diri di tengah masayarakat. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi tanpa memerlukan desakan dari dalam diri atau pengaruh orang lain. Pemenuhan kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan orang lain. Tak jarang pemenuhan kebutuhan yang mendesak tersebut harus bersinggungan dengan tindak pidana.

Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang memiliki sifat bertentangan dengan hukum, yang pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.1 Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang melawan aturan yang berlaku secara pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih yang didasari dengan modus-modus atau cara-cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana

1 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 61.

1

semua orang dapat melakukannya (delik communia) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (delik propria).

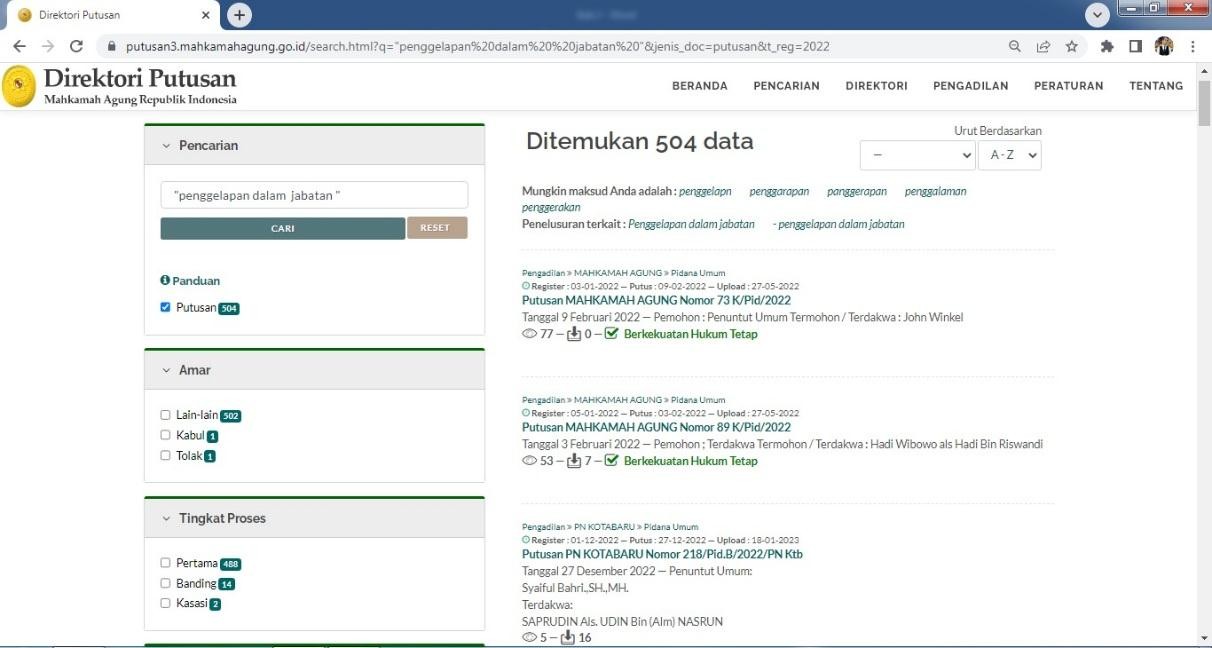
Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377 yang berlaku bagi masyarakat biasa, serta Pasal 415 KUHP sampai Pasal 417 KUHP bagi seseorang yang berstatus pegawai negeri yang melakukan penggelapan dalam jabatannya.2 Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah di lakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta.

Tejadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana. Berdasarkan data yang peniliti kutip dari situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 504 putusan mulai dari putusan tingkat pertama hingga tingkat kasasi terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan selama tahun 2022.3 Hal ini

2 Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,* Jakarta: Kencana, 2015, Cetakan Ke-I, hal. 139.

3 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22penggelapan%20dalam%20> jabatan %22&jenis\_doc=putusan&t\_reg=2022, diakses pada tanggal 2/3/2023, pukul 17:04 WIB.

menjadi bukti nyata bahwa praktik penggelapan dalam jabatan masih banyak terjadi di Indonesia.



Sumber: mahkamahagung.go.id

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubugan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).4 Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian

4 Mahendri Massie, *Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 7, September 2017, hal. 101.

internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.5

Salah satu contoh kasus yang dikaji oleh peneliti adalah mengenai putusan tindak pidana penggelapan di Pengadilan Lubuk Pakam, Putusan Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp. Amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Asraruddin Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua mengadili menyatakan terdakwa Dedek Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dengan Pemberatan” serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan merupakan suatu tindak pidana yang merugikan perusahaan, dan pada akhirnya juga merugikan masyarakat yang bergantung pada produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan harus diberikan sanksi yang tegas dan adil agar dapat

5 *Ibid*, hal. 101

memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Studi kasus mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PT. Tempo dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp menjadi topik yang menarik untuk diteliti secara yuridis. Hal ini karena putusan tersebut dapat menjadi acuan dalam menilai apakah proses hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam karya ilmiah ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp dengan mengacu pada bahan hukum primer yang relevan seperti KUHP Pasal 372 dan Pasal

374 tentang Penggelapan. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PT. Tempo, terutama dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp. Selain itu, karya ilmiah ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan di sektor swasta. Dengan demikian, karya ilmiah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perlindungan hukum bagi perusahaan dan masyarakat dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji, membahas dan meninjaunya dengan menuangkan ke dalam bentuk

penulisan karya ilmiah Tesis dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Tempo (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp)”.

# Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pidana penggelapan dalam jabatan?
  2. Bagaimana hukum positif membedakan antara tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang dilakukan Oleh Salesman Mix PT Tempo?
  3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Salesman Mix PT Tempo (Analisis putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp)?

# Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan para peneliti tidak hanya memberikan nilai manfaat bagi pengetahuan, tetapi juga memiliki tujuan yang sudah ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Hal senada juga disebutkan oleh Bruggink bahwa hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*)

merupakan tujuan dari penelitian.6 Sementara, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Untuk mengetahui hukum positif membedakan antara tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang dilakukan Oleh Salesman Mix PT Tempo;
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Salesman Mix PT Tempo (Analisis putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp).

# Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

* 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hukum Pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

6 JJH Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 216.

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran baru dalam bidang hukum pidana mengenai penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PT. Tempo, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penggelapan, khususnya dalam kasus yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, serta pemahaman tentang putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp dalam konteks hukum pidana, sehingga dapat memberikan bahan evaluasi bagi proses peradilan di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap perusahaan dan masyarakat dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang besar sebagai sumbangan pemikiran baru dalam bidang hukum pidana, serta manfaat praktis dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

* 1. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai penggelapan dalam jabatan, baik dari segi penerapan hukum pidana materil maupun penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan sehingga terciptanya kepastian hukum.

Penelitian ini memberikan informasi yang sangat berguna bagi perusahaan dalam hal tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan sistem pengawasan dan pencegahan terhadap

tindak pidana serupa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga integritas dalam bekerja.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan masukan yang berharga bagi penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan di sektor swasta, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian dan praktik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran, pencegahan, penegakan hukum, dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

# Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sepengetahuan peneliti, tesis dengan topik penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan PT. Tempo Scan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Meskipun begitu, ada kemiripan lain terhadap judul penelitian ini memiliki perbedaan yang mempengaruhi pada hasil penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan No. 432/Pid.B/2018/PN.Plg.

Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang menjadi acuan, yaitu mengkaji tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan. Namun, objek penelitian dan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian yang menjadi acuan, sehingga hasil penelitiannya pun akan berbeda.

* 1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/Pid.B/2009/PN.PL). Penelitian ini juga memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang menjadi acuan, yaitu mengkaji tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan. Namun, objek penelitian dan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian yang menjadi acuan, sehingga hasil penelitiannya pun akan berbeda.
  2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No.

362/Pid.B/2018/PN.TJB). Penelitian ini memiliki judul yang hampir sama dengan penelitian yang menjadi acuan. Namun, lokasi penelitian dan nomor putusan pengadilan yang dijadikan acuan berbeda, sehingga hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil akan berbeda.

Dari ketiga judul di atas, peneliti dapat menjamin keaslian penelitian ini, karena pembahasan dan kesimpulan dalam tesis ini akan membahas dari sudut pandang yang yang berbeda dari penelitian dengan tema yang sama, yaitu penggelapan dalam jabatan. Peneliti lebih menekankan pada aspek penerapan hukum pidana

materil dan penerapan sanksi pidana, termasuk membedakan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.

# Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

* 1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.7 Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir- butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.8

Dalam kaitan ini, teori hukum yang dijadikan landasan teori untuk pemecahan masalah hukum konkret atau yang langsung diterapkan pada praktik hukum adalah pemikiran para teoretisi hukum yang telah diakui kebenarannya dari masa ke masa secara universal.9 Oleh karena itu, untuk menganalisa permasalahan dalam tulisan ini, peneliti menggunakan kerangka Teori Austin dan Teori Jhering.

1. Teori Hukum Positif - John Austin

Teori hukum positif berawal dari dasar pemikiran John Austin yang mengukuhkan pendapatnya mengenai hukum sebagai perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*) yang harus ditaati oleh setiap masyarakat sehingga ada sanski yang akan dikenakan bagi pelanggarannya. Menurut Austin, hukum yang

7 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hal 254.

8 M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal 80.

9 I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hal. 129.

tepat disebut hukum harus memuat 4 (empat) unsur, yaitu *Command* (perintah), *Sanction* (sanksi adalah ancaman hukuman), *Duty* (kewajiban), dan *Sovereignty* (kedaulatan).10

Hukum positip semacam “perintah” (*command*), karena perintah, maka mesti berasal dari satu sumber tertentu. Bila suatu perintah dikeluarkan atau diberitahukan, maka ada pihak yang menghendaki sesuatu yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pihak yang lain (kewajiban), dan pihak yang terakhir ini diancam dengan sesuatu yang tidak enak (sanksi) yang akan dibebankan kepadanya, jika ia tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama. Tiap hukum positip dibuat oleh seseorang/badan yang berdaulat yang memegang (*suvereign*).11

Dalam penelitian ini, teori hukum positif dapat diterapkan dalam menganalisis kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT. Tempo. Penulis dapat mengkaji berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, serta analisis putusan pengadilan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Teori ini menekankan bahwa hukum ditetapkan oleh negara dan harus diikuti oleh semua orang, termasuk karyawan PT. Tempo yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya.

Teori hukum positif juga dapat menjadi bahan perbandingan dengan pandangan alternatif seperti teori hukum natural, yang menekankan pada prinsip-prinsip moral

10 Supriyono, *Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Positivisme*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XV, Nomor 2, November 2017.

11 *Ibid.*

atau keadilan universal. Sebagai peneliti atau penulis karya ilmiah, penting untuk mempertimbangkan berbagai pandangan dan pendekatan dalam menangani kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menjadi fokus karya ilmiah ini.

Selain itu, teori hukum positif juga dapat dihubungkan dengan pemahaman bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara terhadap semua pihak, termasuk pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, penulis dapat melakukan analisis terhadap putusan pengadilan terkait hukuman yang diberikan kepada karyawan PT. Tempo sebagai upaya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penerapan hukum.

1. Teori Retributive Murni

Teori retributive murni adalah pandangan dalam bidang hukum dan keadilan yang mengemukakan bahwa hukuman harus diberikan sebagai bentuk balas dendam atas kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan pencegahan kejahatan atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Menurut teori ini, keadilan hanya dapat terwujud melalui pemenuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan, yang harus setimpal dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.12

Salah satu ahli yang mengemukakan pandangan retributif murni adalah Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman pada abad ke-18. Kant menganggap bahwa hukuman harus diberikan sebagai balasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan, karena keadilan hanya dapat terwujud melalui penghukuman terhadap

12 Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2009, hal. 22.

pelanggar hukum. Menurut Kant, hukuman juga harus dibatasi oleh prinsip-prinsip moral yang bersifat universal, sehingga tidak menimbulkan penganiayaan atau perlakuan tidak adil terhadap pelaku kejahatan. Namun, pandangan retributif murni juga memiliki kritik dari beberapa ahli dan studi ilmiah. Salah satu kritik utama adalah bahwa pandangan ini terlalu berfokus pada pembalasan dan mengabaikan tujuan lain dari hukuman seperti rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa depan. Selain itu, penggunaan hukuman sebagai bentuk balas dendam dapat memperburuk situasi dan menimbulkan siklus kekerasan, sehingga pendekatan yang lebih konstruktif dan humanis dapat dicari untuk menyelesaikan masalah kejahatan.13

Sebagai contoh, studi oleh Ahli Hukum Amerika, Herbert Morris, yang diterbitkan pada tahun 1968 berjudul "The Idea of Retribution" menyatakan bahwa retribusi hanya dapat dipertanggungjawabkan jika hukuman diberikan secara adil dan setimpal dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Morris juga mengemukakan bahwa hukuman yang tidak adil atau tidak setimpal dengan kejahatan dapat memicu peningkatan kekerasan dan memperburuk situasi, sehingga perlu ada keseimbangan antara keadilan dan tujuan pencegahan kejahatan.14

Sumber lain yang membahas teori retributive murni antara lain adalah "Retribution and Just Deserts" oleh Michael S. Moore, yang mempertanyakan apakah balas dendam dapat dianggap sebagai bentuk keadilan atau hanya sebagai bentuk balas dendam semata. Namun, Moore juga menyatakan bahwa retribusi

13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 10-11.

14 Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 104.

dapat dibenarkan jika hukuman diberikan secara adil dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.15

Dalam prakteknya, penggunaan teori retributive murni sebagai dasar penghukuman dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan budaya negara tertentu. Beberapa negara masih mengadopsi pandangan retributif murni, sementara yang lain cenderung lebih mengutamakan pendekatan rehabilitasi atau restoratif. Namun, dalam setiap kasus, penting untuk memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dan bahwa tujuan lain dari hukuman juga tidak diabaikan.

Dalam konteks penelitian ini, teori retributive murni dapat menjadi acuan atau pandangan dasar dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Sebagai teori yang menekankan pada prinsip balas dendam atau pembalasan atas kejahatan, teori retributive murni mengemukakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus setimpal dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, teori retributive murni dapat pula diterapkan dalam analisis terhadap putusan pengadilan terkait hukuman yang diberikan kepada karyawan PT. Tempo yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya. Penulis dapat melakukan analisis terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan oleh karyawan PT. Tempo dan membandingkannya dengan hukuman yang diberikan oleh pengadilan.

15 *Ibid*.

# Kerangka Konseptual

* + 1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Menurut Alwi, dkk, tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).16

* + 1. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.17 Dalam hal penulisan karya ilmiah, pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

* + 1. Tindak Pidana

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.18

16 Hasan Alwi, dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hal. 912.

17 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hal. 1821.

18 Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 54., dalam Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal. 92.

* + 1. Penggelapan

Penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau merasa memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya dan bukan berasal dari kejahatan.19 Berdasarkan kaedah Hukum Yurisprudensi, penggelapan diartikan sebagai perbuatan mengaku bahwa sesuatu barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian sebagai miliknya, sudah memenuhi unsur-unsur tindak kejahatan penggelapan, apalagi barang tersebut kemudian dijual kepada orang lain.20

* + 1. Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.21

* + 1. Karyawan

Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).22 Karyawan dapat juga dipersamakan dengan tenaga kerja yang berarti setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.23

* + 1. PT. Tempo

19 M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 570.

20 *Putusan Mahkamah Agung No. 1046 K/Pid/1995, tanggal 26 Juni 1996.*

21 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 604.

22 *Ibid*., hal. 688.

23 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PT. Tempo adalah perusahaan barang konsumen yang berdomisili di Jakarta yang didirikan di Jakarta pada 3 November 1953 terdaftar sebagai perusahaan publik telah resmi tercatat publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode TSPC sejak pada tanggal 17 Juni 1994. PT. Tempo memiliki perwakilan cabang penjualan di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara, tepatnya di Kompleks Industri Medan Star, Jl. Pelita II No. 2-4 Tanjung Morawa, Deli Serdang.24

* + 1. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telahaan.25

* + 1. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang.26

* + 1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah pengadilan umum sehari-hari yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).27

24 https://id.wikipedia.org/wiki/Tempo\_Scan, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022, Pukul

14:42.

25 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 1530.

26 Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

27 M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op.Cit.*, hal. 567.

* + 1. Lubuk Pakam

Lubuk Pakam adalah salah satu [kecamatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan) yang terletak di wilayah [Kabupaten Deli Serdang,](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang) provinsi [Sumatra Utara,](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara) [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Kecamatan Lubuk Pakam juga menjadi [ibu kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota) dari kabupaten Deli Serdang. Lubuk Pakam dilintasi oleh [Jalan Raya Lintas Sumatra](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Lintas_Sumatra) dan Jalur [Kereta Api](https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api) [Trans-Sumatera](https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api) serta merupakan salah satu pusat proyek pengembangan [Mebidang](https://id.wikipedia.org/wiki/Mebidangro) ([Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)-[Binjai](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Binjai)-[Deli Serdang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang)). Dan kecamatan Lubuk Pakam dekat dengan [Bandar Udara Internasional Kualanamu](https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Kualanamu), yang berada di kecamatan [Beringin.](https://id.wikipedia.org/wiki/Beringin%2C_Deli_Serdang)28

# Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

* 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptis analisis dan pendekatan konseptual. Maksud dari yuridis normatif di sini adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan.29 Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research),* yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik sebagaimana yang tertulis di dalam Kitab Undang Undang *(Law As It Written*

28 https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk\_Pakam,\_Deli\_Serdang, diakses pada tanggal 03

Oktober 2022, Pukul 14:48.

29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal 23.

*In Book),* maupun hukum dari keputusan hakim melalui putusan pengadilan *(Law As It Dicided By The Judge Through Judicial Process).30*

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dan undang-undang, dan kemudian menghubungkannya dengan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang ditinjau dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan analisis terhadap Pasal-pasal yang terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Selain itu, penulis juga dapat membandingkan peraturan-peraturan tersebut dengan putusan pengadilan yang terkait dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dipilih sebagai fokus penelitian. Hal ini dapat membantu untuk memahami bagaimana peraturan dan undang-undang diterapkan dalam kasus konkrit dan memperlihatkan perbedaan antara teori dan praktik penerapan hukum di Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini juga dapat membantu dalam menemukan solusi atau saran-saran untuk memperbaiki dan meningkatkan penerapan hukum di Indonesia terkait dengan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Misalnya, peneliti dapat memberikan rekomendasi tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap karyawan yang memiliki akses dan tanggung jawab atas aset perusahaan, atau memberikan saran terkait pembaruan atau

30 Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan penelitian hukum pada majalah akreditasi, fakultas hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hal 1.

penyempurnaan peraturan yang terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Dalam keseluruhan penelitian, penerapan penelitian yuridis normatif dapat membantu peneliti untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang ditinjau dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan dan peningkatan penerapan hukum di Indonesia.

Penelitian Preskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum.31 Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penggunaan pendekatan konseptual ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.32

* 1. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

31 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 22.

32 *Ibid*, hal 137-138.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum. Selain itu, dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tesebut dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini.

1. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku- buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

* 1. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpreatasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh.

* 1. Analisa Data

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal- hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan

kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah- langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

# Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual serta metode penelitian.

Bab II : Menjawab Permasalahan I

Bab kedua ini akan menjawab permasalahan pertama, yaitu berkaitan dengan penerapan hukum pidana materil terhadap pidana penggelapan dalam jabatan.

Bab III : Menjawab Permasalahan II

Sama halnya dengan Bab II, Bab III juga akan membahas permasalahan kedua yang berkaitan dengan perbedaan antara tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang dilakukan Oleh Salesman Mix PT Tempo.

Bab IV : Menjawab Permasalahan III

Pada Bab IV ini, peniliti akan menguraikan permasalahan ketiga yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Salesman Mix PT

Tempo (Analisis putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp).

Bab V : Penutup

Pada bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

# BAB II

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

# Pengertian dan Definisi Tindak Pidana Penggelapan

Menurut KBBI, penggelapan adalah proses yang melibatkan tindakan

menyeleweng dan menggunakan barang dengan cara yang tidak sah. R. Soesilo

menjelaskan bahwa penggelapan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang

mirip dengan pencurian menurut pasal 362, tetapi memiliki perbedaan dalam hal

lokasi barang. Dalam pencurian, barang berada pada pemiliknya, bukan pelaku, sedangkan dalam penggelapan, barang tersebut sudah berada pada pelaku.33

Dalam pandangan yuridis, penggelapan didefinisikan dalam Bab X X I V (buku

II) KUHP yang terdiri dari 5 pasal, diantaranya Pasal 372 KUHP yang menjelaskan

tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

“Siapa saja yang dengan sengaja memiliki objek yang seharusnya atau sebagiannya adalah milik orang lain yang bukan disebabkan oleh kejahatan karena kejahatan, bersalah atas penyelewengan, dipidanakan dengan hukuman penjara selama iramanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."

Dengan demikian, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari melakukan tindak pidana,

33 R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal,* Bogor: Politea, 1980, hal. 258.

27

menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan dimulainya barang di tangan bukanlah perbuatan melawan hukum, bukan akibat kejahatan. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

# Unsur-unsur Pasal 372 KUHP

* + 1. **Unsur “Barangsiapa”**

Unsur barangsiapa (bestandeel) adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang

dapat berupa individu atau perusahaan. Unsur "setiap orang" mengacu pada subjek

hukum, baik perseorangan atau badan hukum, dan jika terbukti memenuhi unsur

tindak pidana, maka mereka dapat dikategorikan sebagai pelaku. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari:

* orang (*natuurlijkepersoon*);
* badan hukum (*rechtspersoon*).34

Menurut Simons, *strafbaar feit* atau yang dikenal sebagai delik dijelaskan

sebagai “*eene starfbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande,*

34 Sudikno Metrokusumo, *Mengenali Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hal. 12.

*van een toekeningsvatbaar persoon*”. Kalimat ini dapat diartikan bahwa perbuatan yang dapat dihukum oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

# Unsur “Dengan sengaja”

Unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) adalah kesengajaan (*Opzettelijk*). Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan dan bersifat melekat pada subyek kejahatan atau pelaku. Ini karena unsur "*opzettelijk*" atau "kesengajaan" adalah unsur dalam tindak pidana yang harus dibuktikan.

Terdapat dua teori tentang "disengaja" atau *opzettelijke*. Yang pertama adalah teori kehendak atau *wilshtheorie* yang bersumber dari Simons, dan teori kedua terkait *voorstellingstheorie* atau pengetahuan yang antara lain bersumber dari Hamel.35

Maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah seorang pelaku atau dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP. Menurut PAF. Lamintang, dalam tindak pidana penggelapan, agar seseorang dapat melakukan perbuatan penggelapan, maka pelaku harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

* “Mengetahui” bahwa objek tersebut berada padanya bukan karena tindak kejahatan;

35 E. Rijanto, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 226.

* Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda dengan cara melawan hukum;
* Pelaku “mengetahui” bahwa objek atau benda tersebut sebagian atau keseluruhannya merupakan kepemilikan dari orang lain; dan
* Pelaku “mengetahui” yang kuasai itu adalah sebuah benda.36

Jika terbukti bahwa pelaku memiliki "pengetahuan" dan "kemauan" dalam melakukan tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa pelaku telah memenuhi unsur "kesengajaan" yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP.

# Unsur klaim yang "melanggar hukum"

Unsur "melawan hukum" dalam Pasal 372 KUHP mengacu pada tindakan yang

dilakukan oleh pelaku dengan melanggar aturan hukum tertulis atau norma

masyarakat yang tidak tertulis, bertentangan dengan norma hukum dan hak orang

lain untuk mematuhi batasan hukum. Unsur ini mengacu pada tindakan pelaku yang

mengklaim bahwa sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain

adalah miliknya sendiri dan bertentangan dengan hukum. Tindakan atau perbuatan menurut Defines yang disampaikan Hoge Raad adalah pengendalian suatu objek yang berada dalam kemilikan orang lain dan bertentangan dengan hak pelaku atas benda tersebut.37

Prof Mr. D. Simons berpendapat bahwa membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas

36 PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, hal. 106.

37 PAF Lamintan dan C. Jisman Samosir, *Hukum Pidana-Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hal.

155.

benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Sementara menurut Munir Fuadi, tindakan yang dilakukan harus melawan hukum, namun mulai tahun 1919 unsur-unsur yang berlawanan dengan hukum tersebut ditafsirkan secara luas, antara lain sebagai berikut:

* Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan.
* Melanggar hak individu lain yang telah dijamin oleh hukum.
* Tindakan melanggar undang-undang yang berlaku.
* Perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum.

# Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai harta benda bukan dengan cara melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Adami Chazawi, benda yang berada dalam kepemilikan seseorang memiliki hubungan erat dengan orang tersebut sehingga jika ia akan melakukan suatu tindakan terhadap objek tersebut, ia dapat melakukannya dengan segera dan jelas tanpa harus melakukan tindakan lain terlebih dahulu. Benda dengan kepemilikan orang lain yang berada dalam kendali seseorang bukan karena kejahatan merupakan salah satu faktor dari tindak pidana penggelapan dan dapat terjadi karena tindakan hukum seperti hak asuh, perjanjian sewa, ancaman, dan lain-lain.38

38 Adami Chawawi, Delik-delik Khusus: Tindak Pidana Penggelapan, Jakarta: Grafika, 2003, hal. 5.

# Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab X X I V Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

* + 1. Penggelapan biasa

Yang disebut penggelapan biasa adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya (zich toeegenen), sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, tetapi yang berada di bawahnya kontrol bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun”.

* + 1. Penggelapan Ringan

Pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan temak dan harganya tidak mencapai atau tidak lebih dari Rp.25. (Pasal 373 KUHP)

* + 1. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memperoleh suatu objek itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena seseorang tersebut memperoleh keuntungan tertentu (Pasal 374 KUHP).

Pada Pasal 374 KUHP memang tidak disebutkan secara luas pengertian tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*Means Rea*) berupa kesengajaan, bersalah dan melawan hukum dan objektif (*Actus Reus*) pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki,39 objek kejahatan sebuah benda berada

39 Tulus Tambunan, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 246.

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan dan mendapat upah khusus.

Pada penggelapan dengan Pemberatan Pasal 375 KUHP Ketentuan tentang penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 375 KUHP, yang menyatakan : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasai selaku demikian, diancam pidana paling lama enam tahun”. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Apabila dilihat lebih mendalam tindak pidana dalam pasal 375 KUHP

di atas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penggelapan
2. Suatu benda
3. Yang berada di bawah kekuasaannya
4. Orang yang melakukan penggelapan itu haruslah :
   1. Seseorang kepada siap barang tersebut karena terpaksa harus dititipkan
   2. Seorang wali
   3. Seorang pengampu
   4. Seorang pelaksana dari surat wasiat, dan
   5. Seorang pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan.
      1. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni tindak pidana penipuan yang dapat diberikan contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh pengampu, wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya. (Pasal 375 KUHP).40

# Konsep dan Asas Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil adalah cabang hukum yang membahas tentang tindak pidana dan bagaimana hukum memproses pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana materil, terdapat beberapa konsep dan asas yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sikap hukum terhadap tindak pidana.

Konsep-konsep yang harus diperhatikan dalam hukum pidana materil adalah:41

1. Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan ditentukan oleh undang-undang sebagai tindakan yang melanggar hukum. Kejahatan bisa berupa tindakan yang merugikan masyarakat, negara, atau individu lain.

1. Konsep Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku tindak pidana bisa berupa individu atau kelompok.

40 Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 37.

41 Saldi Isra, *Teori dan Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 56.

1. Konsep Korban

Korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Korban bisa berupa individu, kelompok, masyarakat, atau negara.

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum pidana materil adalah:42

1. Asas Presumtif Keamanan

Asas ini berarti bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Ini berarti bahwa hukum harus membuktikan bahwa pelaku tindak pidana melakukan tindakan yang melanggar hukum sebelum memberikan hukuman.

1. Asas Proportionalitas

Asas ini berarti bahwa hukuman harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hukuman harus proporsional dengan tindakan yang melanggar hukum, tidak boleh terlalu berlebihan atau terlalu ringan.

1. Asas Individualisasi

Asas ini berarti bahwa setiap tindak pidana harus diperlakukan secara individual dan tidak boleh ada diskriminasi. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan tindakannya, tidak peduli siapa mereka atau apa latar belakang mereka.

Dalam hukum pidana materil, konsep dan asas ini harus diperhatikan dalam memproses tindak pidana. Ini memastikan bahwa hukuman yang d iberikan sesuai dengan tindakan pelaku tindak pidana dan bahwa setiap orang diperlakukan secara

42 Susanto Sutojo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali, 2018, hal. 74.

adil dan proporsional. Ini juga membantu untuk memastikan bahwa tujuan hukum pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat dan mempromosikan keadilan, dapat tercapai.

Namun, meskipun konsep dan asas hukum pidana materil sangat penting, mereka juga memiliki beberapa hambatan. Misalnya, hukuman yang proporsional seringkali sulit ditentukan dan bisa berbeda antara masing-masing kasus. Selain itu, hukuman yang sesuai dengan tindakan pelaku tindak pidana juga bisa sangat bervariasi tergantung pada negara atau wilayah hukum yang berlaku.

Untuk mengatasi hambatan ini, hukum pidana materil harus terus dikembangkan dan diterapkan secara adil dan proporsional. Ini memastikan bahwa tindak pidana dapat diterima dengan hukuman yang sesuai dan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan proporsional.43

Secara keseluruhan, konsep dan asas hukum pidana materil memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukuman yang diterapkan sesuai dengan tindakan pelaku tindak pidana dan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan proporsional. Ini membantu memastikan bahwa tujuan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat dan mempromosikan keadilan, dapat tercapai.

Selain itu, konsep dan asas hukum pidana materil juga membantu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum berkaitan dengan keyakinan masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan merata pada setiap

43 Harry Purwanto, *Hukum Pidana: Kajian Teoritik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal.

41

individu yang melakukan tindak pidana. Ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang stabil dan aman bagi masyarakat.

Namun, untuk mencapai kepastian hukum, hukum pidana materil harus menjaga agar tindakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak diskriminatif. Ini membantu memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan diterapkan pada setiap kasus, serta membantu mengatasi masalah seperti diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu.

Sebagai bagian dari hukum pidana, hukum pidana materil juga memegang peran penting dalam membentuk moral dan budaya hukum. Hukuman yang diterapkan bagi tindak pidana harus memperlihatkan bahwa tindakan tersebut tidak diterima oleh masyarakat dan harus memotivasi individu untuk tidak melakukan tindak pidana.

Sebagai kesimpulan, konsep dan asas hukum pidana materil memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan proporsional, memastikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan membentuk moral dan budaya hukum. Oleh karena itu, hukum pidana materil harus diterapkan secara konsisten dan merata, dan harus selalu dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul.

Sebagai bagian dari hukum pidana, hukum pidana materil harus selalu diterapkan dengan memperhatikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan standar universal yang harus diakui dan dilindungi oleh setiap negara dan individu. Oleh karena itu, hukuman yang diterapkan bagi tindak pidana harus

memastikan bahwa hak asasi manusia pelaku tindak pidana tetap dilindungi dan diakui.44

Dalam hal ini, hukum pidana materil harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, serta memastikan bahwa hukuman yang diterapkan tidak merugikan hak-hak asasi manusia pelaku tindak pidana. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan proporsional, dan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan tetap diakui dan dilindungi.

Sebagai contoh, hukum pidana materil harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana memiliki akses yang adil dan merata ke proses peradilan. Ini meliputi hak untuk memiliki pembelaan yang memadai, hak untuk memiliki akses yang memadai ke bukti yang relevan, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, hukum pidana materil memegang peran penting dalam

memastikan bahwa hukuman yang diterapkan bagi tindak pidana memperhatikan

hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu,

hukum pidana materil harus selalu dipertahankan dan dikembangkan untuk

memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan tetap diakui dan

dilindungi.

# Hubungan Tindak Pidana Penggelapan dengan Hukum Pidana Materil

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan hak milik orang lain. Tindak pidana penggelapan adalah tindakan

44 Dwi Sasono, *Teori dan Asas-asas Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta: Ombak, 2019, hal.

33.

memperoleh barang milik orang lain dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana penggelapan memperoleh barang milik orang lain dengan tidak memperhatikan hak milik orang tersebut.45

Tindak pidana penggelapan memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana, serta bagaimana tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman. Dalam hal ini, hukum pidana materil memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan atau tidak.46

Berdasarkan hukum pidana materil, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah: (1) terdapat unsur maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah; (2) terdapat unsur memperoleh barang milik orang lain; dan (3) terdapat unsur tidak memperhatikan hak milik orang tersebut.

Jika suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.

Hukum pidana materil juga memiliki peran dalam menentukan tingkat keparahan hukuman yang harus dikenakan terhadap pelaku tindak pidana

45 Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Prenada Media, 2022, hal. 83.

46 *Ibid.*

penggelapan. Dalam hal ini, hukum pidana materil mengatur tentang berbagai macam tingkatan hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, mulai dari hukuman pidana ringan hingga hukuman pidana berat.

Tingkat keparahan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah jumlah barang yang dicuri, serta nilai barang tersebut, serta ada atau tidaknya unsur kekerasan atau ancaman terhadap korban. Semakin besar jumlah barang yang dicuri dan nilai barang tersebut, maka tingkat keparahan hukuman yang dikenakan akan semakin berat. Demikian juga jika terdapat unsur kekerasan atau ancaman terhadap korban, maka tingkat keparahan hukuman yang dikenakan akan semakin berat.47

Dalam hal ini, hukum pidana materil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak milik orang lain, serta dalam memberikan hukuman yang sebanding dengan tindakan pelaku tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, hukum pidana materil harus diterapkan secara adil dan proporsional agar dapat memenuhi tujuannya.

Namun, meskipun hukum pidana materil memiliki peran yang sangat penting, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana materil terkait dengan tindak pidana penggelapan. Salah satu kendala yang paling sering dijumpai adalah sulitnya membuktikan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana penggelapan.

47 Bambang Widodo, *Hubungan Tindak Pidana Penggelapan dengan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019.

Untuk itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah ini. Aparat penegak hukum harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dan bagaimana cara melaporkan tindak pidana penggelapan jika terjadi. Selain itu, juga perlu adanya peningkatan sistem dan prosedur dalam penegakan hukum pidana materil terkait dengan tindak pidana penggelapan. Sistem dan prosedur yang efisien dan transparan akan membantu mempermudah upaya pembuktian suatu tindakan sebagai tindak pidana penggelapan, sekaligus mempercepat proses hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan.48

Dengan adanya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta peningkatan sistem dan prosedur dalam penegakan hukum pidana materil terkait dengan tindak pidana penggelapan, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan tindak pidana penggelapan dan memperkuat sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak milik orang lain.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan wewenang seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, pejabat tersebut melakukan tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara mempergunakan kewenangan yang diterimanya.

48 Yohanes Judianto, *Hukum Pidana Materiil: Pengertian, Sifat, Jenis dan Unsur Delik*, Jakarta: Rajagrafindo, hal. 189.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat berkaitan dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu subyektif dan objektif, yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti *mens rea* dan *actus reus*.

*Mens rea* adalah unsur subyektif dalam hukum pidana yang mengacu pada niat buruk pelaku tindak pidana. Dalam hal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, mens rea yang harus diterima adalah niat buruk pelaku untuk memperkaya diri atau pihak lain dengan mempergunakan kewenangan yang diterimanya. Sedangkan actus reus adalah unsur objektif dalam hukum pidana yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, *actus reus* yang harus diterima adalah tindakan pelaku yang mempergunakan kewenangan yang diterimanya untuk memperkaya diri atau pihak lain dengan cara yang melawan hukum.49

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang seorang pejabat. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan memperkuat sistem hukum pidana yang ada.

49 Agus Pramono, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Unnes Press, 2019, hal. 44.

Dalam hal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pihak berwenang harus mengumpulkan bukti- bukti yang kuat dan valid untuk menguji keabsahan tindakan pelaku. Bukti-bukti tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai bukti yang sah dalam pengadilan, seperti independen, obyektif, dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan hanya merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat, namun juga merupakan tindak pidana yang merugikan martabat dan harkat kehormatan pejabat yang melakukannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus dilakukan dengan tegas dan tidak membeda- bedakan siapapun.50

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemerintah harus menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat. Pemerintah juga harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat agar mengetahui dan memahami bagaimana melaksanakan tugas dan wewenang dengan benar dan baik.

Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kita dapat melaporkan setiap

50 Yusuf Suryawan, *Tindak Pidana Penggelapan: Tinjauan Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hal. 50.

dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat kepada pihak berwenang. Kita juga dapat memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus dikenali sebagai tindak pidana yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kita semua harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini dan memastikan bahwa tindak pidana yang telah terjadi dapat dikenakan sanksi yang setimpal. Dengan demikian, harapannya adalah akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mempercayai institusi pemerintah dan memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan akan terus ditekan dan diberantas.51

Sebagai negara hukum, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dapat diproses dan diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas institusi pemerintah dan memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak akan terulang lagi. Di sisi lain, tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga merupakan tindak pidana yang merugikan aset negara dan mempengaruhi perekonomian negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus dilakukan dengan serius dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

51 Devi Kristiana, *Penggelapan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Unsur Delik dan Pertimbangan Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal. 57.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dikenakan sanksi yang setimpal. Kita dapat melaporkan setiap dugaan tindak pidana yang kita ketahui kepada pihak berwenang, dan memastikan bahwa tindak pidana yang terjadi dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita juga dapat memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus dikenali sebagai tindak pidana yang sangat serius dan harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Kita semua harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini dan memastikan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum.

Secara keseluruhan, harapannya adalah akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mempercayai institusi pemerintah dan memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan akan terus ditekan dan diberantas. Ini akan membantu membangun negara yang lebih baik dan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemerintah dapat melakukan beberapa hal seperti:52

52 Ida Bagus Gede Arimbawa Putra et.al., *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 3, September 2022.

1. Menyediakan sistem yang transparan dan akuntabel bagi pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat.
2. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap kegiatan pemerintahan dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi pejabat yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan memastikan bahwa sanksi tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebagai sanksi yang adil.
4. Menyediakan mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
5. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan pegawai pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi mereka dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang transparan dan akuntabel.
6. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum.
7. Menyediakan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat ditekan dan diberantas.

Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan sehingga masyarakat dapat mempercayai institusi pemerintah dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diberantas.

Sebagai negara hukum, harus ada konsekuensi hukum bagi setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hukum pidana materil memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap tindak pidana dapat diproses dan dikenakan sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus dilakukan secara adil dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Dengan demikian, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diberantas dan masyarakat dapat merasa aman dan merasa b ahwa institusi pemerintah mereka mampu melindungi hak mereka dan memberikan perlindungan terhadap tindak pidana.

1. **Penegakan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan** Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Tindak pidana penggelapan terjadi ketika seseorang secara sengaja dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, menyebabkan hilangnya benda milik orang lain atau negara. Dalam hal ini, hukum pidana materil memainkan peran yang sangat penting dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan.

Hukum pidana materil adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana agar dapat dikenakan pidana. Hukum pidana materil memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana karena hukum pidana materil menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana penggelapan atau bukan.

Dalam hal penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:53

1. Penegakan hukum pidana materil harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. Setiap pelaku tindak pidana penggelapan harus diperlakukan sama tanpa terkecuali, baik itu pelaku tindak pidana penggelapan yang berasal dari kalangan ekonomi tinggi maupun rendah.
2. Adanya bukti yang cukup. Dalam hal ini, bukti yang cukup harus ada untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana penggelapan telah terjadi. Bukti yang cukup harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan.
3. Adanya penyidikan yang baik dan akurat. Penyidikan harus dilakukan dengan baik dan akurat agar dapat membuktikan bahwa suatu tindak pidana penggelapan telah terjadi. Dalam hal ini, penyidik harus memahami betul unsur-unsur tindak pidana penggelapan sehingga dapat menyusun bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana penggelapan tersebut.
4. Adanya pengadilan yang fair. Dalam hal ini, pengadilan harus menerapkan prinsip keadilan dan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Pelaku tindak pidana penggelapan harus diadili dengan fair dan tidak diskriminatif.

53 Henry Nurdin, *Penegakan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 1, 2020.

1. Penerapan sanksi yang sesuai. Dalam hal ini, sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan. Sanksi yang diterapkan harus merupakan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana penggelapan agar tidak melakukan tindak pidana penggelapan lagi.
2. Pengawasan dan supervisi yang berkesinambungan. Dalam hal ini, pengawasan dan supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum pidana materil yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu mengatasi tindak pidana penggelapan secara efektif. Pemerintah juga harus memastikan bahwa aparat penegak hukum yang ada mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.54

Penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan memang tidak mudah dilakukan, namun hal ini harus dilakukan demi kepentingan bersama. Tindak pidana penggelapan merugikan banyak pihak, sehingga penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh.

54 Setiawan Budi Santoso dan Dwi Ria Latifa, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, Vol. 4, No. 1, 2017.

Hukum pidana materil memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan. Hukum pidana materil harus diterapkan secara objektif dan tidak diskriminatif, serta harus diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan akurat. Penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat agar tindak pidana penggelapan dapat ditegakkan dan diberantas dengan efektif.

Untuk menegakkan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara efektif, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan baik. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap tindak pidana penggelapan dapat ditemukan dan dikenakan sanksi yang sesuai. Sementara pemerintah harus memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki sumber daya yang memadai dan teknologi yang canggih untuk melakukan tugasnya.

Selain itu, masyarakat juga memegang peran yang penting dalam penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan. Masyarakat harus memahami bahwa tindak pidana penggelapan merugikan banyak pihak dan harus ditegakkan hukum. Masyarakat juga harus membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Setiap orang yang melakukan tindak pidana penggelapan harus dikenakan sanksi yang sesuai tanpa terkecuali, baik itu orang kaya atau miskin, pejabat atau warga sipil.

Dalam menegakkan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan, juga penting untuk memperhatikan hak asasi manusia yang berlaku. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana penggelapan harus memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.55

Penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan harus dilakukan dengan cara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat agar tindak pidana penggelapan dapat ditegakkan dan diberantas secara efektif. Di samping itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem pengadilan pidana bekerja dengan baik dan efektif. Proses peradilan harus memenuhi standar keadilan yang baik dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana penggelapan.

Untuk memastikan hal ini, pemerintah harus memperkuat sistem pengadilan pidana dengan memastikan bahwa para hakim dan jaksa memiliki kualifikasi yang memadai dan memastikan bahwa sistem pengadilan pidana bekerja dengan cepat dan efisien. Pemerintah juga harus memastikan bahwa para tersangka tindak pidana penggelapan memiliki akses yang memadai ke jasa pengacara yang berwenang.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dapat dikenakan sanksi yang memadai. Sanksi yang memadai harus memastikan bahwa tindak pidana penggelapan tidak menjadi tindakan yang menguntungkan bagi para

55 Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 202.

pelakunya. Sanksi yang memadai juga harus memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dapat diberantas secara efektif.56

Sistem peradilan pidana juga harus memastikan bahwa tindak pidana penggelapan dapat diproses dengan cepat dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa sistem peradilan pidana memiliki sumber daya yang memadai dan teknologi yang canggih untuk memproses tindak pidana penggelapan dengan cepat dan efisien.

56 *Ibid*., hal. 210.

# BAB III

**PERBEDAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PASAL 372 KUHP DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

# DALAM PASAL 374 KUHP

1. **Unsur-Unsur Kejahatan**

Penggelapan adalah salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan ekonomi. Tindak pidana penggelapan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana dan penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 KUHPidana sesuai hukum positif di Indonesia.56

Dalam tulisan ini, akan dibahas unsur-unsur kejahatan dari masing-masing jenis penggelapan tersebut.

* 1. Tindak Pidana Penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana

Pasal 372 KUHPidana mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang meliputi pengambilan atau penyitaan benda milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan. Beberapa unsur yang harus ada dalam tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana antara lain:

* + 1. Objek Penggelapan

Objek penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana adalah benda atau barang milik orang lain. Benda atau barang tersebut dapat berupa benda bergerak (mobil, sepeda

56 Nyoman Wartha, *Analisis Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 2, 2018, hal. 166-175.

53

motor, perhiasan, dan lain-lain) maupun benda tidak bergerak (tanah, bangunan, dan lain-lain).46

* + 1. Subjek Pidana

Subjek pidana dalam tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana dapat berupa siapa saja yang melakukan tindakan penggelapan. Baik itu individu maupun badan hukum dapat menjadi subjek pidana dalam tindak pidana ini.

* + 1. Tindakan Penggelapan

Tindakan penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana mencakup pengambilan atau penyitaan benda milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Tindakan penggelapan harus dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan.

* + 1. Niat

Niat atau maksud pelaku dalam melakukan tindakan penggelapan sangat penting dalam tindak pidana ini. Pelaku harus memiliki maksud untuk menguasai benda milik orang lain secara melawan hukum.

* + 1. Tanpa Izin atau Kekuasaan

Tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana terjadi ketika pelaku melakukan tindakan pengambilan atau penyitaan benda milik orang lain tanpa izin atau kekuasaan dari pemilik benda atau pihak yang berwenang.

46 *Ibid*.

* 1. Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan pada Pasal 374 KUHPidana Beberapa unsur yang harus ada dalam tindak pidana penggelapan dengan

pemberatan pada Pasal 374 KUHPidana antara lain:47

1. Objek Penggelapan

Objek penggelapan pada Pasal 374 KUHPidana tidak jauh berbeda dengan objek penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana, yaitu benda yang dapat dipindahtangankan seperti uang, surat berharga, kendaraan, dan lain sebagainya. Namun, yang membedakan adalah cara atau modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penggelapan. Pada Pasal 372 KUHPidana, pelaku melakukan penggelapan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada Pasal 374 KUHPidana pelaku melakukan penggelapan dengan pemberatan atau dengan cara yang lebih berat, seperti dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dilakukan pada waktu malam atau di tempat sepi.48

Ketika objek yang digelapkan bernilai besar atau penggelapan dilakukan dengan cara yang lebih berat, maka tindak pidana penggelapan akan dikategorikan sebagai penggelapan dengan pemberatan. Dalam pasal 374 KUHPidana, unsur pemberatan dijelaskan sebagai pelaku melakukan penggelapan dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang yang rugi atau mempergunakan kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau keadaan lain untuk melancarkan penggelapan.

47 Siti Fatimah, *Analisis Pasal 372 dan 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Hubungannya dengan Pekerjaan atau Jabatan*, Jurnal Ilmu Hukum & Kriminologi, vol. 18, no. 2, 2019, hal. 105- 116.

48 *Ibid*.

Untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana penggelapan, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPidana. Pertama, pelaku harus melakukan pengambilan atau penyitaan benda yang milik orang lain. Kedua, pelaku harus memiliki maksud atau tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum. Ketiga, pengambilan atau penyitaan benda tersebut dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 372 KUHPidana atau dilakukan dengan pemberatan pada Pasal 374 KUHPidana. Keempat, benda tersebut dapat dipindahtangankan atau memiliki nilai ekonomi.49

Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana penggelapan memiliki beberapa varian yang memiliki unsur-unsur yang berbeda. Namun, pada intinya, tindak pidana penggelapan adalah tindakan yang merugikan hak milik orang lain dan dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan harus dilakukan dengan tegas dan adil agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Sel ain itu, pendidikan dan sosialisasi terkait hukum dan etika juga perlu ditingkatkan, baik bagi masyarakat umum maupun bagi para pejabat publik. Dengan cara ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika serta memperkuat rasa keadilan di masyarakat.50

Perbedaan antara Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

49 Imam Suroso, *Analisis Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan yang Dilakukan oleh Orang yang Memegang Barang itu Berhubungan dengan Pekerjaan atau Jabatannya*, Jurnal Hukum & Peradilan, vol. 36, No. 2, 2019, hal. 109-125.

50Adiwarman Bahari, *Teori dan Kasus Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 90-91.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pasal 372** | **Pasal 374** |
| 1. | Barang yang diambil tidak berhubungan  dengan pekerjaan atau jabatan | Barang yang diambil terkait dengan  pekerjaan atau jabatan |
| 2. | Tidak mendapat upah uang atas barang  yang diambil | Mendapat upah uang atas barang yang  diambil |
| 3. | Ancaman hukuman penjara maksimal selama-lamanya 4 tahun atau denda  maksimal sebesar Rp. 900 | Ancaman hukuman penjara maksimal selama-lamanya 5 tahun |
| 4. | Dilakukan dengan sengaja dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya  bukan karena kejahatan | Dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut dalam hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah uang atas  barang itu |

Dari tabel perbedaan tersebut, secara ringkas dapat dilihat bahwa perbedaan utama antara Pasal 372 dan Pasal 374 adalah terkait dengan hubungan antara pelaku penggelapan dengan barang yang diambil. Pasal 372 mengatur penggelapan barang yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan pelaku, sedangkan Pasal 374 mengatur penggelapan barang yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan pelaku atau karena ia mendapat upah uang atas barang itu. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan juga berbeda, di mana Pasal 372 mengancam hukuman maksimal selama-lamanya 4 tahun atau denda maksimal sebesar Rp. 900, sedangkan Pasal 374 mengancam hukuman maksimal selama-lamanya 5 tahun.

# Tingkat Keparahan Kejahatan

Pada dasarnya, setiap tindakan kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tingkat keparahannya. Hal ini juga berlaku dalam

kasus tindak pidana penggelapan. Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPidana masing- masing memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yang sangat merugikan korban baik secara materi maupun non-materi. Penggelapan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh individu maupun oleh kelompok, dan dapat terjadi di berbagai situasi, baik dalam hubungan kerja maupun di masyarakat umum. Untuk menangani kejahatan ini, hukum pidana Indonesia telah mengatur berbagai pasal terkait penggelapan, termasuk Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPidana.51

Pasal 372 KUHPidana mengatur tentang tindak pidana penggelapan, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dipakai sendiri atau untuk orang lain, dengan tidak memiliki hak atau persetujuan dari pemilik barang. Dalam Pasal ini, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penggelapan, yaitu adanya barang milik orang lain yang diambil, maksud untuk dipakai sendiri atau untuk orang lain, serta tidak memiliki hak atau persetujuan dari pemilik barang.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dianggap sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat keparahan yang cukup serius. Hal ini dikarenakan tindakan pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah dapat merugikan korban secara finansial dan non-finansial. Korban mungkin merasa kehilangan nilai barang yang dicuri, tetapi mereka juga mungkin mengalami stres dan kecemasan akibat dari perbuatan tersebut. Selain itu, tindakan penggelapan

51 Siti Fatimah, *Op.Cit*.

juga dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemilik barang, terutama jika barang yang dicuri memiliki nilai yang tinggi.

Selanjutnya, Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang karena hubungan pekerjaannya atau jabatannya. Perbuatan penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggelapan biasa yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

Tingkat keparahan dari penggelapan dengan pemberatan ini terletak pada unsur-unsur di mana pemberatannya adalah dalam hal:52

1. terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki; dan
3. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana mengatur tentang penggelapan tanpa pemberatan. Hal ini berarti pelaku melakukan tindakan

52 https://[www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-penggelapan-dengan-pemberatan-](http://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-penggelapan-dengan-pemberatan-) lt4e9f694721b03, diakses pada tanggal 25 Februari 2023, Pukul 16:19 WIB.

pengambilan atau pemindahan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam konteks ini, barang yang digelapkan dapat berupa benda apapun, seperti uang, perhiasan, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Dalam Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana penggelapan dianggap sebagai kejahatan yang ringan, dan pelakunya dapat dikenai hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900.

Sementara itu, Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan. Dalam hal ini, Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang penggelapan yang dilakukan karena hubungan pekerjaan atau jabatan. Pelaku melakukan tindakan penggelapan karena diserahi untuk menyimpan barang milik orang lain dalam konteks hubungan pekerjaan atau jabatan. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Dalam menghadapi kasus tindak pidana penggelapan, kita perlu memahami dua pasal yang mengatur perbuatan tersebut dalam KUHPidana, yaitu Pasal 372 dan Pasal 374. Setiap pasal memiliki tingkat keparahan kejahatan yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik dari perbuatan penggelapan itu sendiri.53 Tingkat keparahan kejahatan dari tindak pidana penggelapan pada kedua pasal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti nilai barang yang digelapkan, cara pelaku melakukan tindakan penggelapan, dan juga motif dari perbuatan tersebut. Misalnya, penggelapan dalam lingkungan pekerjaan dianggap lebih berat karena pelakunya

53 Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Kasus-Kasus Penting*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018, hal. 211.

memanfaatkan posisinya sebagai pekerja untuk mengambil keuntungan pribadi dari harta perusahaan.

Pada akhirnya, tindak pidana penggelapan pada pasal 372 KUHPidana dan Pasal 374 KUHPidana memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Namun, mereka semua dapat merugikan korban dan membawa dampak jangka panjang yang signifikan. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami konsekuensi dari melakukan tindak pidana penggelapan dan dampaknya terhadap korban. Dalam kasus tindak pidana penggelapan, korban seringkali mengalami kerugian finansial dan kerugian non-keuangan, seperti kehilangan kepercayaan dan rasa aman.

# Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan pihak lain. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 dalam KUHPidana. Pasal 372 mengatur penggelapan tanpa pemberatan, sedangkan Pasal 374 mengatur penggelapan dengan pemberatan. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPidana.54

Pasal 372 KUHPidana mengatur tentang penggelapan tanpa pemberatan. Penggelapan dalam Pasal 372 KUHPidana diartikan sebagai suatu perbuatan memasukkan barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya sendiri dengan

54 Imam Suroso, *Op.Cit.*

maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik barang.

Sementara itu, Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan dalam Pasal 374 KUHPidana diartikan sebagai suatu perbuatan memasukkan barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya sendiri dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan ini dilakukan dengan pemberatan, yaitu adanya hubungan kerja dan penerimaan upah dalam melakukan penggelapan.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, penyelidikan harus dilakukan dengan hati- hati dan cermat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku. Kedua, peran saksi dan korban sangat penting dalam proses penyidikan dan persidangan. Ketiga, para penyidik dan hakim harus menguasai dan memahami hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.55

Polisi harus melakukan penyelidikan yang cermat dan hati-hati dalam proses penyidikan. Polisi harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana penggelapan. Bukti-bukti yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana penggelapan antara lain surat bukti kepemilikan, bukti transfer, rekaman CCTV, keterangan saksi, dan keterangan ahli.

Keterangan saksi dan korban sangat penting dalam proses penyidikan dan persidangan. Keterangan saksi dan korban dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana penggelapan. Saksi dan korban harus memberikan

55 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 134.

keterangan yang jujur dan tidak bertentangan dengan keterangan lainnya. Keterangan saksi dan korban harus didukung dengan bukti-bukti lainnya yang dapat menjadi alat bukti dalam persidangan.

Para penyidik dan hakim harus menguasai dan memahami hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Penyidik dan hakim harus memahami bahwa tindak pidana penggelapan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan modus operandi. Penyidik dan hakim harus dapat melakukan analisis yang teliti dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 374 KUHPidana harus dilakukan secara tegas dan adil. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dimulai dari penyidikan. Penyidik harus dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan memadai sebagai dasar untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Selain itu, penyidik juga harus dapat memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.

Setelah dilakukan penyidikan, kasus kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memprosesnya ke pengadilan. Jaksa penuntut umum harus dapat menentukan jenis tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, apakah termasuk dalam Pasal 372 atau Pasal 374 KUHPidana.

Pada saat persidangan, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diperoleh dan mempertimbangkan dengan hati-hati semua faktor yang ada dalam

kasus tersebut. Hakim harus dapat mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan putusan, seperti besarnya kerugian yang dialami korban, niat dan motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan, serta rekam jejak terdakwa dalam melakukan tindak pidana.56

Jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 372 atau Pasal 374 KUHPidana. Hukuman yang dapat diberikan berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya. Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana dapat mencapai waktu maksimal 4 tahun, sedangkan dalam Pasal 374 KUHPidana, hukuman pidana penjara yang dapat diberikan lebih berat, mencapai waktu maksimal 5 tahun. Selain hukuman pidana penjara, tindak pidana penggelapan pada pasal 372 dan 374 KUHPidana juga dapat dikenai hukuman denda. Hukuman denda merupakan jenis hukuman yang dikenakan berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh korban.

Hukuman denda merupakan hukuman yang cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Selain itu, hukuman denda juga dapat membantu mengurangi kerugian yang diderita oleh korban. Namun, penerapan hukuman denda juga perlu ditegakkan secara adil dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan kecenderungan bagi pelaku tindak pidana untuk

56 Arjuna Siregar, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 1, 2020.

melakukan penggelapan karena merasa dapat membayar denda sebagai pengganti kerugian yang ditimbulkan.

Terkait dengan penerapan hukuman denda, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kasus tersebut, seperti tingkat keparahan perbuatan, jumlah kerugian yang diderita oleh korban, dan kemampuan pelaku untuk membayar denda tersebut. Hal ini akan membantu menentukan besaran hukuman denda yang sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Selain itu, dalam penerapan hukuman denda juga perlu diperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pada kasus penggelapan dengan nilai barang yang cukup besar, misalnya, memberikan hukuman denda yang terlalu berat dapat menyebabkan pelaku mengalami kesulitan ekonomi yang serius, bahkan sampai merugikan keluarganya. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku dalam membayar denda tersebut sehingga hukuman yang diberikan tidak terlalu berat dan dapat dijalankan secara manusiawi.57

Korban biasanya menderita kerugian finansial yang cukup besar dalam tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah penggantian kerugian kepada korban. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan melawan hukum merugikan orang lain, wajib mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya".

Dalam prakteknya, penggantian kerugian dapat dilakukan melalui proses perdata di pengadilan. Korban dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku

57 Dion Valerian, *Op.Cit*.

atau pihak yang terkait dengan tindak pidana penggelapan, seperti perusahaan atau institusi tempat pelaku bekerja. Dalam gugatan perdata, korban dapat meminta pengadilan untuk menetapkan jumlah kerugian yang harus diganti oleh pelaku atau pihak terkait.

Selain melalui proses perdata, penggantian kerugian juga dapat dilakukan melalui proses pidana. Dalam hal pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, hakim dapat menetapkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada korban sebagai bagian dari putusan pidana. Dalam hal ini, penggantian kerugian biasanya merupakan bagian dari hukuman tambahan yang diberikan oleh hakim. Namun, dalam prakteknya, penggantian kerugian kepada korban seringkali sulit dilakukan. Hal ini terutama terjadi jika pelaku tidak memiliki aset atau kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar ganti rugi. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran atau pemberian keringanan pembayaran kepada pengadilan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penggantian kerugian hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat mengenai kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan dan persidangan, penyidik dan hakim harus memastikan bahwa bukti yang diperoleh cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.58

Dalam kesimpulan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada pasal 372 dan 374 KUHPidana dapat dilakukan melalui proses penyidikan dan persidangan yang teliti dan berkeadilan. Penting bagi penyidik dan hakim untuk

58 Akbar Rizal, *Evaluasi Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 2, 2020.

memahami berbagai modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana penggelapan, serta melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mengumpulkan bukti yang kuat dan mengajukan tuntutan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, penggantian kerugian kepada korban juga harus menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan pidana, tetapi juga mendapatkan penggantian kerugian atas kerugian finansial yang diderita.

1. Penegakan Hukum Pada Penggelapan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Penggelapan dalam dunia kerja merupakan tindakan yang merugikan baik bagi perusahaan maupun pekerja. Tindakan penggelapan biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum, penggelapan dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang hubungan antara pekerja dan perusahaan. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan. Meski Undang- Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana penggelapan, namun masih terdapat kaitan akibat dari perbuatan tindak pidana

tersebut yang diatur dalam undang-undang tersebut, terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).59

Penggelapan pada dasarnya adalah tindakan menyembunyikan barang atau uang yang seharusnya diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam konteks kerja, penggelapan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya saja pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja namun tidak dibayar sesuai dengan ketentuan, atau perusahaan yang tidak memberikan tunjangan yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Istilah "suatu hal tertentu" dalam frasa tersebut merujuk pada berbagai alasan yang dapat menjadi dasar sah bagi pengusaha untuk melakukan PHK. Dalam hal ini, tindak pidana penggelapan dapat menjadi "suatu hal tertentu" yang menjadi alasan pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerja/buruh. Misalnya, jika seorang pekerja/buruh melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan tempat dia bekerja, maka perusahaan memiliki dasar hukum untuk melakukan PHK atas pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut.60

Dalam kasus seperti ini, PHK hanya dapat dilakukan setelah pengusaha melakukan prosedur hukum yang sesuai, seperti memberikan peringatan atau sanksi

59 Muhammad Natsir, *Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Upah Karyawan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum UHO, Vol. 5, No. 2, 2017.

60 Iwan Permadi, *Hukum Pidana dan Ketenagakerjaan: Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hal. 76.

yang sesuai, dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pekerja/buruh telah terbukti melalui proses hukum yang adil dan sesuai.

Ketentuan mengenai PHK kini diatur dalam Pasal 81 angka 37 [Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&q=uu%20cipTA%20KERJA&rs=1847&re=2020) [Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&q=uu%20cipTA%20KERJA&rs=1847&re=2020) yang mengubah Pasal 151 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:61

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
2. Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
4. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 81 angka 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal ini

61 https://[www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-di-phk-karena-dituduh-menggelapkan-](http://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-di-phk-karena-dituduh-menggelapkan-) uang-perusahaan-lt5df1b2b863804, diakses pada tanggal 8/03/2023, pukul 8:16 WIB.

merupakan perubahan dari Pasal 151 UU Ketenagakerjaan yang lama. Berikut adalah rincian mengenai ketentuan PHK menurut Pasal 81 angka 37:62

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus berupaya agar tidak terjadi PHK. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus berusaha untuk menghindari terjadinya PHK. Hal ini mengisyaratkan bahwa PHK tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus mempertimbangkan kondisi karyawan serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, pengusaha harus memberikan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengusaha harus memberikan alasan yang jelas dan transparan mengenai maksud dan alasan PHK kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan menghindari terjadinya PHK yang tidak adil.

Jika pekerja/buruh menolak PHK, pengusaha harus melakukan perundingan bipartit dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk menyelesaikan PHK. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jika pekerja/buruh menolak PHK, maka pengusaha harus melakukan perundingan bipartit dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Perundingan bipartit merupakan upaya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan PHK dengan melibatkan kedua belah pihak.

62 *Ibid*.

Jika perundingan bipartit tidak berhasil, PHK dapat dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jika perundingan bipartit tidak berhasil, maka PHK dapat dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mekanisme ini dapat melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan.

PHK dapat dilakukan oleh pengusaha dengan berbagai alasan, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Sebelum revisi UU Cipta Kerja, Pasal 158 ayat

1. huruf a UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap karyawan dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat berupa penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Oktober 2004 melalui Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 membatalkan pasal tersebut.63

Alasan penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan merupakan salah satu alasan subjektif yang sering digunakan oleh pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawan. Alasan subjektif lainnya seperti prestasi kerja yang buruk, konflik dengan atasan, ketidakhadiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sebagainya. Sedangkan alasan objektif adalah alasan PHK yang didasarkan pada faktor-faktor di luar kemampuan karyawan, seperti adanya pemutusan kontrak kerja oleh pemberi proyek, penurunan produksi, atau restrukturisasi perusahaan. Dalam hal ini, pengusaha harus memberikan kompensasi kepada karyawan yang

63 Agus Sigit Widodo dan Achmad Nurmandi, *Implikasi Pasal 81 UU Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Dalam PHK Berdasarkan UU Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 3, 2021, hal. 301-321.

di-PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, setelah dihapus melalui Pasal 81 angka 47 UU Cipta Kerja, pengusaha sekarang dapat melakukan PHK dengan alasan yang lebih luas, termasuk alasan ekonomi dan teknologi, restrukturisasi perusahaan, dan lain-lain. Alasan PHK ini harus dibuktikan oleh pengusaha dengan data dan fakta yang jelas, serta harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.64

Sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan [Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24262/node/10/se-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-no-se-13_men_sj-hk_i_2005-tahun-2005-putusan-mahkamah-konstitusi-atas-hak-uji-materiil-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945) [Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tahun 2005 tentang Putusan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24262/node/10/se-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-no-se-13_men_sj-hk_i_2005-tahun-2005-putusan-mahkamah-konstitusi-atas-hak-uji-materiil-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945) [Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24262/node/10/se-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-no-se-13_men_sj-hk_i_2005-tahun-2005-putusan-mahkamah-konstitusi-atas-hak-uji-materiil-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945) [2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24262/node/10/se-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-no-se-13_men_sj-hk_i_2005-tahun-2005-putusan-mahkamah-konstitusi-atas-hak-uji-materiil-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945) [Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24262/node/10/se-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-no-se-13_men_sj-hk_i_2005-tahun-2005-putusan-mahkamah-konstitusi-atas-hak-uji-materiil-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945) **(**SE 13/2005**)**. Diuraikan di dalamnya bahwa penyelesaian kasus PHK karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memerhatikan hal-hal berikut:

* 1. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka berlaku ketentuan Pasal 160 UU Ketenagakerjaan.

64 *Ibid.*

Dalam surat edaran ini, diuraikan bahwa jika pengusaha akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja/buruh (sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan), maka PHK tersebut dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, pengusaha harus menunggu keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa pekerja/buruh benar-benar melakukan kesalahan berat sebelum melakukan PHK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa PHK dilakukan secara adil dan tidak semata-mata berdasarkan asumsi atau tudingan pengusaha. Selain itu, surat edaran juga menegaskan bahwa jika pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka berlaku ketentuan Pasal 160 UU Ketenagakerjaan. Pasal ini menyatakan bahwa selama pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena penahanan, maka pengusaha wajib memberikan ganti rugi kepada pekerja/buruh. Dengan demikian, surat edaran ini memberikan panduan bagi pengusaha dalam menyelesaikan kasus PHK yang berkaitan dengan kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja/buruh, serta memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang ditahan oleh pihak berwajib dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya.65

Pasal 81 angka 49 UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan dalam Pasal 160 UU Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam hal terdapat “alasan mendesak” yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha

65 *Ibid.*

dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil dalam hal terjadi tindak pidana penggelapan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan, serta memastikan bahwa terdakwa mendapat pengadilan yang adil dan transparan. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan harus dilakukan secara tegas dan adil oleh pihak-pihak yang berwenang, baik oleh penyidik, hakim, maupun jaksa penuntut umum. Selain itu, pihak-pihak terkait juga perlu melakukan upaya pencegahan, seperti pemberian pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam institusi-institusi yang rentan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih.

Dalam menghadapi kasus tindak pidana penggelapan, pihak-pihak terkait harus memperhatikan aspek-aspek hukum, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari tindak pidana.

# BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 2697/PID.B/2021/PN LBP ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KARYAWAN PT. TEMPO SCAN TBK**

# Kasus Posisi

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang pria bernama Dedek Setiawan yang lahir di Sei Putih pada tanggal 13 Maret 1978, sehingga saat ini berusia 43 tahun. Terdakwa berkebangsaan Indonesia dan tinggal di Jalan Pala No.19 Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa menganut agama Islam dan bekerja sebagai seorang karyawan swasta di PT Tempo Scan Pacific Tbk .

PT Tempo Scan Pacific Tbk (Perusahaan) didirikan pada tahun 1953 dan telah berkembang dalam operasinya hingga saat ini menjadi salah satu perusahaan penjualan dan distribusi terkemuka di Indonesia. Saat ini, perusahaan ini mendistribusikan produk untuk perusahaan multinasional dan lokal, dengan portofolio kelompok produk yang meliputi farmasi & kesehatan konsumen, kosmetik & perawatan pribadi, pembersih rumah tangga, susu formula bayi, dan minuman.66

66 https://[www.pttempo.com/AboutUs.aspx?Menu=1,](http://www.pttempo.com/AboutUs.aspx?Menu=1) diakses pada tanggal 13/03/2023, Pukul 15:54 WIB.

75

Jaringan penjualan dan distribusi Tempo tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia, yang memungkinkan Tempo untuk mencapai pelanggan dengan lebih cepat dan efisien - faktor kunci yang telah membantu Tempo dan mitra bisnisnya mencapai pertumbuhan penjualan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir.

Tenaga penjualan Tempo meliputi hampir semua jenis outlet, mulai dari apotek, rumah sakit, institusi, jaringan supermarket dan toko independen, toko obat, grosir dan outlet ritel, dan cakupan langsung ke dokter untuk produk vaksinnya. Perusahaan ini memiliki kelompok tenaga penjualan yang didedikasikan untuk segmen perdagangan tertentu, yang memungkinkannya untuk fokus lebih pada jenis produk yang dijual dalam saluran distribusi tertentu.

Layanan Tempo untuk perdagangan selain cakupan penjualan termasuk, antara lain, fasilitas kredit yang kompetitif, personel layanan pelanggan di setiap cabang penjualan, dan armada pengiriman sepeda motor dan truk yang cukup untuk melayani pesanan semua pelanggan.

Untuk mitra bisnisnya, Tempo juga menyediakan, selain fungsi penjualan & distribusi, layanan manajemen akun khususnya dalam bidang analisis bisnis, manajemen persediaan, pergudangan pusat, dan perencanaan dan pelaksanaan promosi perdagangan.

Dengan pengalaman lebih dari 50 tahunnya, Tempo mencatat prestasi yang terbukti, ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang konsisten dari tahun ke tahun, basis pelanggan yang semakin berkembang, dan portofolio produk yang semakin meningkat. Semua ini, didukung dengan dasar keuangan yang solid,

menjadi platform komitmen Tempo untuk terus tumbuh dan melakukan upaya berkelanjutan untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya.

Kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa bermula pada hari Jumat Tanggal 24 September 2021, sekira Pukul 13.30 Wib, di perusahaan PT. Tempo Group di jalan Pelita 2 Blok A No. 2-4 Kompleks Kawasan Industri Medan Star Desa Tanjung Morawa-B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Dedek Setiawan dengan cara pelaku melakukan order barang ke rumah sakit malahayati dan selanjutnya Entri menjadi faktur penjualan, lalu oleh Delivery perusahaan PT. Tempo Group mengantarkan barang pesanan order tersebut kerumah sakit malahayati dengan membawa kembali faktur penjualan warna putih dan biru sedangkan faktur penjualan warna merah di tinggalkan kepada pihak rumah sakit malahayati sebagai tanda terima barang.

Seminggu kemudian bagian finance Perusahaan PT. Tempo Group membuatkan tagihan berupa membuat Tanda Terima Faktur ke rumah sakit, dan setelah di terima rumah sakit maka Faktur penjualan asli warna putih ditinggalkan dirumah sakit tersebut dan tanda terima faktur setelah ditanda tangani rumah sakit di bawa kembali ke perusahaan PT. Tempo Group.

Setelah 30 (tiga puluh) hari tepat jatuh tempo pembayaran oleh Dedek Setiawan selaku Salesmen Mix melakukan penagihan ke Rumah Sakit Malahayati dengan membawa tanda terima faktur tersebut, dan menerima pembayaran dari rumah sakit malahayati sebesar Rp.73.835.858 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) namun uang tersebut tidak di setorkan ke perusahaan PT. Tempo Group. Adapun Terdakwa merupakan

karyawan di PT. Tempo Group dan mendapatkan gaji tiap bulannya dari perusahaan tersebut.

# Dakwaan Tindak Pidana

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan faktor- faktor yang dapat meringankan atau memperberat kesalahan terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan, baik dalam bentuk putusan pemidanaan maupun lainnya. Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP mengatur tentang pertimbangan tersebut. Pasal 197 huruf d memerintahkan agar pertimbangan mengenai fakta, keadaan, dan alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan harus disusun dengan ringkas sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f memerintahkan agar pertimbangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, serta keadaan yang dapat memperberat atau meringankan kesalahan terdakwa.68

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh hakim, tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain, Pasal 8 ayat (2) mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa saat memutuskan berat ringannya pidana. Pertimbangan hakim

68 Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, hal. 4

dalam memutuskan bukan hanya didasarkan pada logika, akal, dan pengetahuan, melainkan juga harus didasarkan pada kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika, yang disebut sebagai "intuitif irasional". Dengan begitu, putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat dianggap adil.69

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 2697/Pen.Pid.B/2021/PN.Lbp, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

Dalam dakwaan pertama, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHPidana karena Terdakwa memegang barang yang bersangkutan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang.

Dalam dakwaan kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana karena dengan sengaja memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Jaksa Penuntut Umum memberikan Dakwaan berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya “saling mengecualikan“. Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi “pengganti“ dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another)*. Karena Penuntut Umum

69 Syarif Mapillase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2017, hal.

12.

merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana di antara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHPidana.

Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

* 1. Setiap Orang;
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
  3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
  4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
  5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut:

# Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.

Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yang bernama Dedek Setiawan ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Dedek Setiawan, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Mengenai apakah benar Terdakwa Dedek Setiawan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya, dinyatakan telah terpenuhi.

# Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dikehendaki oleh si pelaku atau termasuk dalam niatnya. Sedangkan tentang melawan hukum artinya betentangan

dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa bekerja di PT. Tempo Group sudah 14 (empat belas) tahun. Masuk kerja di PT. Tempo Group sejak tahun 2003.

Saksi Kurnia Rezeki, saksi Syaiful, saksi Srininta Br. Bangun benar mengetahui kejadian penggelepan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 24 September 2021, sekira pukul 13.30 Wib di perusahaan PT. Tempo Group yang beralamat di Jl. Pelita 2 Blok A No. 2-4 Komplek Kawasan Industri Medan Star Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, setelah mengkonfirmasi penagihan ke Rumah Sakit Malahayati, yang mana ternyata Rumah Sakit Malahayati telah membayar lunas uang obat-obatan yang dibeli dari PT. Tempo Group melalui Karyawan PT. Tempo Group dengan jabatan Salesmen Mix yang bernama Dedek Setiawan (Terdakwa).

Uang yang Terdakwa terima dari Rumah Sakit Malahayati sebesar Rp.73.835.858,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan rupiah) adalah benar, dan uang tesebut Terdakwa gelapkan. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang dari Rumah Sakit Malahayati sebesar Rp.73.835.858,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan rupiah), adalah merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi.

# Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain maksudnya barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi milik orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar uang sebesar Rp.73.835.858,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan rupiah), bukan milik Terdakwa, tetapi milik dari PT. Tempo Group. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi.

# Yang ada padanya bukan karena kejahatan

Bahwa bukan karena kejahatan maksudnya barang yang diambil tersebut sudah dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar sistem / mekanisme orderan barang oleh pembeli (Rumah Sakit) adalah pembeli (Rumah Sakit) terlebih dahulu memesan barang berupa Surat Pesanan Tertulis yang diserahkan kepada Customer Sales Servis, kemudian Customer Sales Servis melakukan antri order untuk dijadikan faktur penjualan dan setelah menjadi faktur pembelian, kemudian di planingkan untuk dikirimkan ke pembeli (Rumah Sakit) yang memesan, kemudian pihak gudang PT. Tempo Group akan menyiapkan barang sesuai dengan faktur penjualan lalu oleh Delivery PT. Tempo Group

mengantarkan barang sesuai dengan faktur penjualan, setelah barang pesanan sampai pada pembeli (Rumah Sakit), maka faktur penjualan barang diserahkan kepada pembeli (Rumah Sakit). Setelah itu, pihak Finance menyiapkan tagihan. Faktur bon penjualan barang warna merah yang diserahkan kepada pembeli (Rumah Sakit), sedangkan faktur bon warna putih dan warna biru dibawa ke PT. Tempo Group. Setelah pihak Finance menyiapkan Tanda Terima Faktur ke pembeli (Rumah Sakit) dan setelah Rumah Sakit menerima, maka faktur penjualan asli warna putih ditinggalkan di Rumah Sakit tersebut, dan setelah ditanda tangani Rumah Sakit, dibawa kembali ke PT. Tempo Group.

Bahwa benar yang digelapkan oleh Terdakwa selaku Salesmen Mix di PT. Tempo Group adalah berupa uang penjualan dari Rumah Sakit Malahayati, sesuai dengan faktur penjualan sebagai berikut:

* 1. Faktur Penjualan nomor : 1422139404 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
  2. Faktur Penjualan nomor : 1422139405 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.1.247.850,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  3. Faktur Penjualan nomor : 1422139415 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);
  4. Faktur Penjualan nomor : 1422139435 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  5. Faktur Penjualan nomor : 1422139490 tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.2.527.620,00 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
  6. Faktur Penjualan nomor : 1422139491 tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.8.827.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  7. Faktur Penjualan nomor : 1422139492 tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.17.654.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  8. Faktur Penjualan nomor : 1422140023 tanggal 21 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.9.807.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
  9. Faktur Penjualan nomor : 1422140416 tanggal 27 Maret 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

dengan jumlah total penagihan sebesar Rp.50.516.476,00 (lima puluh juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), dan penerimaan uang diterima pada tanggal 3 April 2020.

Bahwa benar Faktur penjualan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Faktur Penjualan nomor 122214003 tanggal 4 April 2020 dengan nilai penjualan Rp.15.680.000,00 (lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Faktur Penjualan nomor 1422141574 tanggal 18 April 2020 dengan nilai penjualan Rp.264.060,00 (dua ratus enam puluh empat ribu enam puluh rupiah);
3. Faktur Penjualan nomor 14221662 tanggal 21 2020 dengan nilai penuialan Rp.998.280,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Faktur Penjualan nomor 14221722 tanggal 22 April 2020 dengan nilai penjualan Rp.659.675,00 (enam ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Faktur Penjualan nomor 1422142231 tanggal 29 April 2020 dengan nilai penjualan Rp.1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Faktur Penjualan nomor 1422142281 tanggal 29 April 2020 dengan nilai penjualan Rp.1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

dengan jumlah total penangihan sebesar Rp.20.035.015,00 (dua puluh juta tiga puluh lima ribu lima belas rupiah), dan penerimaan uang pada tanggal 5 Mei 2020.

Bahwa benar Faktur penjualan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Faktur Penjualan nomor 1422142468 tanggal 4 April 2020 dengan nilai penjualan Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Faktur Penjualan nomor 1422142817 tanggal 13 Mei 2020 dengan nilai penjualan Rp.2.374.373,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

dengan jumlah total penagihan sebesar Rp.3.284.373,00 (tiga juta dua ratus depalan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan Penerimaan uang pada tanggal 3 Juni 2020.

Bahwa benar uang penjualan tersebut seharusnya disetorkan Terdakwa kepada kasir PT. Tempo Group yang bernama Tri Dewi Juliani.

Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai sales menerima orderan dari konsumen dan juga bertugas untuk menagih uang penjualan obat-obatan dari konsumen yang sudah membeli obat-obatan dari PT. Tempo Group.

Bahwa benar kerugian PT. Tempo Group atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tanda terima penerimaan uang yakni sebesar Rp.73.835.858,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai Sales yang bertugas menerima orderan dan melakukan penagihan uang penjualan obat-obatan dari konsumen, maka berarti Terdakwa berwenang atau mempunyai kewenangan untuk mengambil uang setoran dari Rumah Sakit Malahayati sebesar Rp.73.835.858,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), maka dengan demikian, MajelisHakim berpendapat bahwa unsur empat telah terpenuhi.

# Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Bahwa yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, maksudnya adalah Terdakwa diserahi menyimpan sesuatu barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, karena jabatannya, atau karena mendapat upah uang.

Bahwa R. Sugandi, SH dalam KUHP dengan Penjelasannya halaman 392 menyatakan bahwa kejahatan ini dinamakan “penggelapan berat”, yang dapat dituntut menurut pasal ini misalnya :

1. Seseorang yang karena hubungan pekerjaannya, diserahi menyimpan barang, kemudian digelapkan. Misalnya : hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga, atau antara majikan dengan buruh;
2. Seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya. Misalnya: tukang sepatu, tukang jam atau tukang sepeda yang menggelapkan sepatu, jam atau sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
3. Seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang.

Misalnya : seorang karyawan kereta api yang membayarkan barang dari seorang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawanya itu;

Bahwa mengenai unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang,” adalah tindakan-tindakan atau perbuatanperbuatan yang dilarang oleh pasal ini untuk dilakukan. Dan dari berbagai macam perbuatan yang dilarang tersebut di

atas, adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan- perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa bekerja di PT. Tempo Group sudah 14 (empat belas) tahun. Masuk kerja di PT. Tempo Group sejak tahun 2003.

Bahwa benar jabatan dari dahulu sampai sekarang sebagai sales.

Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai sales menerima orderan dari konsumen dan juga bertugas untuk menagih uang penjualan obat-obatan dari konsumen yang sudah membeli obat-obatan dari PT. Tempo Group.

Bahwa benar pihak Rumah Sakit Malahayati mengorder obat kepada Terdakwa via whatsaap kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa sebagai sales menerima orderan dari konsumen, Terdakwa memasukkan orderan ke Aplikasi PT. Tempo Group yang mana Aplikasi tersebut digunakan untuk memesan produk PT. Tempo Group. Bahwa benar bon faktur diberikan kepada bagian gudang yang bertugas untuk mengeluarkan barang-barang yang telah diorder di bon faktur, lalu bagian delivery mengirim barang-barang yang sudah diorder tersebut kepada konsumen atau pembeli. Yang diberikan kepada konsumen adalah 1 (satu) buah bon faktur penjualan barang-barang kepada konsumen. Setelah itu, pihak Delivery membawa kembali 3 (tiga) lembar bon faktur penjualan ke PT. Tempo Group dan delivery menyerahkan 3 (tiga) lembar bon faktur ke bagian admin gudang, yang mana bon faktur diserahkan kepada bagian inkaso yang bertujuan untuk menerbitkan kontra

bon.

Bahwa benar tujuan kontra bon adalah untuk mengetahui apa saja barang yang sudah dipesan oleh konsumen, lalu Terdakwa sebagai sales membawa kontra bon tersebut kepada konsumen untuk menagih uang pembelian barang-barang milik PT. Tempo Group dari konsumen sesuai kontra bon yang mana konsumen dapat membayarkan uang pembelian barang-barang yang sudah dipesan secara cash kepada Terdakwa, atau melalui bilyet. Setelah 30 (tiga puluh) hari diterima barang, baru dilakukan pembayaran oleh konsumen. Setelah uang diberi oleh konsumen uangnya diberikan kepada kasir.

Bahwa benar tugas Terdakwa PT. Tempo group adalah pengorderan barang untuk konsumen / pembeli dengan sistem yang telah disediakan oleh perusahaan, Penagihan penjualan barang kepada konsumen / pembeli atas orderan yang sudah diambil sebelumnya oleh Salesmen Mix, dan Menyetorkan uang hasil tagihan penjualan barang yang telah ditagih dari konsumen / pembeli ke PT. Tempo Group. Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka unsur kelima ini terpenuhi, sebab terdapat hubungan karena pekerjaan antara Terdakwa dengan PT. Tempo Group, dan hal tersebut merupakan kualifikasi dari perbuatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, sehingga dengan

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kesatu diatas, maka terbuktilah Dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan”, dan

selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/04/0000000867, 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/05/0000001137, dan 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/06/0000001355, karena merupakan milik dari PT. Tempo Group, maka barang-barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Tempo Group melalui saksi Kurnia Rezeki S., SE.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, sebab hal tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial*

*Justice* dan menyimpang dari tujuan pemidanaan, maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si “pembuat”, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

* Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Tempo Group;
* Terdakwa sebagai Sales di PT. Tempo Group, seharusnya memberikan contoh teladan yang baik, bukan malah melakukan penggelapan.

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa belum pernah dihukum;
* Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
* Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
* Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
* Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
* Terdakwa sudah 14 (empat belas) tahun bekerja di PT. Tempo Group Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula

untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedek Setiawan oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   * 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/04/0000000867;
   * 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/05/0000001137;
   * 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/06/0000001355.

Dikembalikan kepada PT. TEMPO GROUP melalui saksi Kurniawan Rezeki S., SE.

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

# Analisis Putusan

Aspek yang sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Selain memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, pertimbangan hakim harus diambil dengan hati-hati, baik, dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan hati-hati, baik, dan teliti, maka putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.70

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara oleh hakim, pembuktian perlu diperhatikan karena hasil pembuktian akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Tahap pembuktian sangat penting dalam persidangan karena bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang diajukan. Tujuan dari pembuktian adalah agar hakim dapat memberikan putusan yang benar dan adil. Oleh karena itu, sebelum hakim dapat menjatuhkan suatu putusan, hakim harus yakin bahwa peristiwa atau fakta yang terjadi telah dibuktikan kebenarannya dalam sidang kasus pidana.

Fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan terkait dengan lokasi, waktu kejadian, dan cara pelaku melakukan tindak pidana atau terjadinya peristiwa hukum. Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan termasuk akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan apakah

70 Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140.

terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta persidangan terungkap, hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Untuk membuat pertimbangan yuridis tentang delik yang didakwakan, hakim perlu menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang sedang dihadapi. Barulah setelah itu, hakim dapat menentukan dengan tepat hukuman yang pantas untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Istilah "penggelapan" yang sering digunakan orang untuk merujuk pada jenis kejahatan yang diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terjemahan dari kata "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang memiliki kualifikasi atau dinamakan sebagai penggelapan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Meskipun terdapat banyak unsur yang sama dengan delik pencurian, namun pada penggelapan barang yang dimaksud untuk dimiliki (zich toeegenen) berada di tangan pelaku penggelapan dan bukan karena seperti pada pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti pada pencurian, tetapi khusus pada Pasal 374 KUHP, kualifikasinya difokuskan pada penggelapan yang dilakukan oleh pejabat.71

Penggelapan adalah perbuatan tidak jujur di mana seseorang atau beberapa orang menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan (pencurian), menguasai, atau menggunakannya untuk tujuan lain. Hukum penggelapan diatur

71 Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2006, hal. 57.

dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Perbuatan penggelapan merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana. Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, tetapi barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindakan kejahatan. Pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penggelapan bukan termasuk ke dalam kategori kejahatan, namun merupakan tindakan melawan hukum yang berawal dari perbuatan kejahatan. Dalam penanganan suatu tindak pidana, memahami dengan jelas jenis tindak pidana yang terjadi adalah penting. Hal ini juga berlaku untuk penggelapan, di mana arti dan definisinya harus dipahami dengan baik. Artinya, penggelapan yang terjadi karena keterkaitannya dengan jabatan atau pekerjaan, atau karena ia diberi upah, termasuk dalam kategori tindak pidana yang lebih berat, yaitu penggelapan dengan pemberatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang menyatakan bahwa pelaku penggelapan dengan pemberatan bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu yang berhubung denga pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memperberat dalam pasal ini adalah adanya "hubungan kerja" dan "karena jabatannya". Hubungan kerja tersebut tidak hanya terjadi dalam instansi pemerintahan atau perusahaan swasta, tetapi juga dapat terjadi antar individu. Pasal 374 KUHPidana tidak menjelaskan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, namun menjelaskan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi tertentu.

Maka pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa Dedek Setiawan telah terbukti:

1. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedek Setiawan oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   * 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/04/0000000867;
   * 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/05/0000001137;
   * 1 (satu) lembar tanda terima faktur dengan nomor 0242/2020/06/0000001355.

Dikembalikan kepada PT. TEMPO GROUP melalui saksi Kurniawan Rezeki S., SE.

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Jika putusan pengadilan sebagaimana diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka berdasarkan putusan pengadilan yang diberikan, dapat dikatakan bahwa pengusaha tidak boleh melakukan PHK tanpa memberikan alasan yang jelas kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 angka 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal

151 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pengusaha harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, dan apabila tidak dapat dihindari, maka maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan terslebih dahulu kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam hal pekerja/buruh menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Jika perundingan bipartit tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja dilakukan

melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Perlu diingat juga bahwa alasan PHK yang sebelumnya diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan yang mengizinkan pengusaha melakukan PHK terhadap karyawan dengan alasan kesalahan berat seperti penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dihapus melalui Pasal 81 angka 47 UU Cipta Kerja. Dalam hal terdapat "alasan mendesak" yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

1. ***Conclusion***

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan hakim. Hakim harus memperhatikan pembuktian peristiwa atau fakta yang terjadi dalam persidangan, termasuk lokasi, waktu kejadian, cara pelaku melakukan tindak pidana, akibat dari perbuatan terdakwa, dan apakah terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Hakim perlu menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang sedang dihadapi untuk membuat pertimbangan yuridis tentang delik yang didakwakan.

Dalam penanganan suatu tindak pidana, memahami dengan jelas jenis tindak pidana yang terjadi adalah penting. Penggelapan bukan termasuk ke dalam kategori kejahatan, namun merupakan tindakan melawan hukum yang berawal dari

perbuatan kejahatan. Penggelapan dapat dikenakan hukuman pidana dan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pelaku penggelapan dengan pemberatan bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal tujuh tahun atau denda maksimal empat puluh lima juta rupiah. Oleh karena itu, memahami definisi dan arti penggelapan dengan baik sangat penting dalam menangani kasus pidana.

# BAB V PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

* 1. Dalam penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 KUHpidana, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi seperti adanya tindakan pengambilan atau penyitaan benda milik orang lain secara melawan hukum dengan cara yang lebih berat. Tujuan dari penerapan hukum pidana materil tersebut adalah memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindakan tersebut dan sanksi hukuman yang diberikan pun lebih berat dibandingkan dengan penggelapan biasa. Penting untuk menjaga agar penerapan hukum pidana materil tersebut dilakukan secara adil dan proporsional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang berintegritas. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pun perlu terus dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera;
  2. Pada tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHPidana, unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah adanya pengambilan atau penguasaan atas benda orang lain, dilakukan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Pada tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pasal 374 KUHPidana, selain unsur-unsur tersebut, juga

101

harus terdapat unsur pemberatan atau cara yang lebih berat dalam pengambilan atau penyitaan benda orang lain. Sementara itu, penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana korupsi membutuhkan unsur adanya pelaku yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja menggelapkan uang atau barang negara atau uang atau barang yang diterimanya karena jabatannya. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan hukum pidana materil yang adil dan proporsional untuk masing-masing tindak pidana penggelapan tersebut dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera; dan

3. Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Lbp terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Salesman Mix PT Tempo, hakim telah menerapkan pertimbangan yang teliti dan hati-hati dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dengan memberikan amar putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Hakim juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, hakim juga menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

# Saran

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan untuk memastikan keadilan dan efektivitas sistem hukum adalah sebagai berikut:

* 1. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi, sanksi yang diberikan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana harus ditingkatkan. Selain itu, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum juga perlu ditingkatkan agar masyarakat percaya dan mendukung upaya-upaya pemberantasan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan;
  2. Perbedaan antara tindak pidana penggelapan pada pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan pada pasal 374 KUHP, dan penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang berbeda pula. Perlu dilakukan pendekatan yang spesifik untuk masing-masing tindak pidana tersebut, misalnya dengan memperkuat lembaga penegak hukum dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pendidikan dan sosialisasi terkait hukum dan etika juga penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan. Diperlukan upaya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan agar dapat mengurangi angka kasus tindak pidana penggelapan di Indonesia; dan
  3. Sanksi harus diberikan secara proporsional dan efektif, baik itu berupa pidana penjara, denda, maupun pemulihan kerugian yang timbul akibat tindakan penggelapan. Pendidikan dan rehabilitasi juga perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan. Penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan dapat memberikan efek

jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dengan pemberatan di kemudian hari.

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Alwi, Hasan dkk, 2003, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, Jakarta: Balai Pustaka.

Aro, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bahari, Adiwarman, *Teori dan Kasus Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Bruggink, JJH, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chawawi, Adami, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana Penggelapan*, Jakarta: Grafika, 2003.

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana.

Effendi, Jonaedi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,* Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-I

Fauzan, M. dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.

Firdaus, M. Surya dkk, 2019, *Hukum dan Politik Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kencana.

Hamzah, Andi, 2017, *Kejahatan di Bidang Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

105

Huijbers, Theo, 1984, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta

Lamintang, PAF., 1989, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.

Lamintan, PAF dan C. Jisman Samosir, 1992, *Hukum Pidana-Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju Mapillase, Syarif, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta:

Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Metrokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenali Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta:

Liberty Yogyakarta.

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara. Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana: Kasus-Kasus Penting*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Rijanto, E., *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

*Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

106

Soesilo, R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal demi Pasal,* Bogor: Politea.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y Hage, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing: Yogyakarta.

Tulus Tambunan, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Rajawali Pers Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press.

Wibowo, Kurniawan Tri dan Warih Anjari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Prenada Media.

# JURNAL & MAKALAH

Alam, Yoga Saputra, et.al., 2021, *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia, Vol. 2, No., 2.

Fatimah, Siti, *Analisis Pasal 372 dan 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Hubungannya dengan Pekerjaan atau Jabatan*, Jurnal Ilmu Hukum & Kriminologi, Vol. 18, No. 2, 2019.

Massie, Mahendri, *Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 7, September 2017.

107

Nasution, Bismar *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan penelitian hukum pada majalah akreditasi, fakultas hukum USU, tanggal 18 Februari 2003

Nurdin, Henry, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 1.

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala

Putra, Ida Bagus Gede Arimbawa et.al., 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 3.

Rizal, Akbar, 2020, *Evaluasi Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 2.

Santoso, Setiawan Budi dan Dwi Ria Latifa, 2017, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, Vol. 4, No. 1.

Saraswati, Retno dkk, 2020, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Yuridika, Vol. 35, No. 2.

108

Siregar, Arjuna, 2020, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 1.

Supriyono, *Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Positivisme*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XV, Nomor 2, November 2017.

Suroso, Imam, *Analisis Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan yang Dilakukan oleh Orang yang Memegang Barang itu Berhubungan dengan Pekerjaan atau Jabatannya*, Jurnal Hukum & Peradilan, vol. 36, No. 2, 2019.

Valerian, Dion, 2019, Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 2.

Wartha, Nyoman, *Analisis Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 2, 2018.

Widodo, Agus Sigit dan Achmad Nurmandi, *Implikasi Pasal 81 UU Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Dalam PHK Berdasarkan UU Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 3, 2021.

Wijaya, Anton, 2019, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 3.

# WEBSITE

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22penggelapan%20dala m%20jabatan %22&jenis\_doc=putusan&t\_reg=2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Tempo\_Scan, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 14:42.

109

https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk\_Pakam,\_Deli\_Serdang, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 14:48.

https:/[/www.hukumonlin](http://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-penggelapan-dengan-)e[.com/klinik/a/tindak-pidana-penggelapan-dengan-](http://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-penggelapan-dengan-) pemberatan-lt4e9f694721b03, diakses pada tanggal 25 Februari 2023, Pukul 16:19 WIB.

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

# PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung No. 1046 K/Pid/1995, tanggal 26 Juni 1996.

110